

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
2024

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 30, BD 2024/ NO. 30, 56 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 30 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 7 Tahun 2023; PERDA No. 9 Tahun 2023; PERBUP No. 73 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pemungutan, prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib pajak BPHTB mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pejabat pembuat akta tanah/ pejabat lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendaftaran SSPD BPHTB paling sedikit memuat NJOP, harga transaksi/nilai pasar, jumlah pajak yang terutang, alamat objek pajak, identitas wajib pajak beserta NIK/NIB bagi wajib pajak yang berbadan hukum, jenis perolehan dan titik koordinat, pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan SSPD BPHTB, penelitian SSPD BPHTB, prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan ke kantor pertanahan, pelaporan penerimaan BPHTB, penagihan, kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak, penghapusan piutang, tata cara pengajuan keberatan dan banding, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, prosedur pembetulan dan pembatalan ketetapan, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, penerimaan pengaduan, saran dan masukan pelayanan, sosialisasi dan edukasi dan ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2024.
- Perbup No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten OKI, Perbup No. 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak benar di Kabupaten OKI, Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 6 hlm